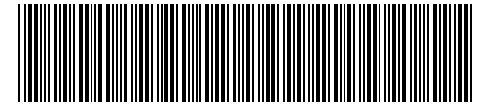




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 013.05.2.409139/2024**



DS:4062-1545-1815-1194

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

Revisi ke 02

Tanggal : 20 Februari 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
3. Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
4. Kode>Nama Satker : (409139) BALAI PEMASYARAKATAN PONTIANAK
- Sebesar : Rp. 5.583.189.000 (LIMA MILIAR LIMA RATUS DELAPAN PULUH TIGA JUTA SERATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	5.583.189.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PONTIANAK (042) Rp. 5.583.189.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.05.2.409139/2024

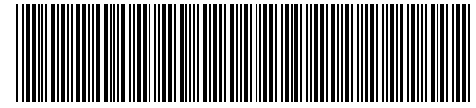


DS:4062-1545-1815-1194

Satker : (409139) BALAI PEMASYARAKATAN PONTIANAK

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Rp.	5.583.189.000
03.03	PEMBINAAN HUKUM	Rp.	4.933.351.000
03.05	LEMBAGA PEMASYARAKATAN	Rp.	649.838.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.05.2.409139/2024

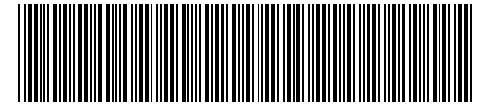


DS:4062-1545-1815-1194

Satker : (409139) BALAI PEMASYARAKATAN PONTIANAK

BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	649.838.000
BF.5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp.	649.838.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	4.933.351.000
WA.6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp.	4.933.351.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.05.2.409139/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



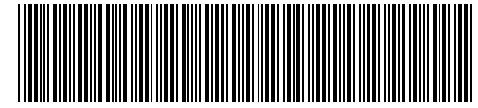
DS:4062-1545-1815-1194

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (409139) BALAI PEMASYARAKATAN PONTIANAK

Halaman : I A. 1

Program	: 013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	649.838.000
Kegiatan	: 5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	649.838.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	
	: 2. 01	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	
	: 3. 01	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	
	: 4. 01	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	
	: 5. 01	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	
	: 6. 01	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	
	: 7. 01	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	
	: 8. 01	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	
	: 9. 02	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	
	: 10. 02	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	
	: 11. 02	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	
	: 12. 02	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap	
	: 13. 02	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	
	: 14. 02	Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	
	: 15. 02	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	
	: 16. 03	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	
	: 17. 03	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	
	: 18. 03	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	
	: 19. 03	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	
	: 20. 03	Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	
	: 21. 03	persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	
	: 22. 04	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.05.2.409139/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4062-1545-1815-1194

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (409139) BALAI PEMASYARAKATAN PONTIANAK

Halaman : I A. 2

Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

23. 04	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
24. 04	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal
25. 04	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
26. 05	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi
27. 05	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
28. 06	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif
29. 06	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
30. 07	Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi
31. 07	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)
32. 08	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika

Klasifikasi Rincian Output	1	:	5252.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	293,00	Orang	649.838.000	
Rincian Output	:		01	BDC.003	Bimbingan Kemasyarakatan	20.00	Orang	58.572.000
			02	BDC.U01	Layanan Pendampingan Peradilan Anak	42.00	Orang	146.156.000
			03	BDC.U02	Pembimbingan dan Pengawasan	169.00	Orang	328.150.000
			04	BDC.U03	Rekomendasi Program Pembinaan dan Pelayanan	62.00	Orang	116.960.000
Program	:		013.05.WA	Program Dukungan Manajemen				4.933.351.000
Kegiatan	:		6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan				4.933.351.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:		1. 01	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasarakatan (Lapas)				
			2. 01	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu				
			3. 02	Jumlah UPT Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan)				
			4. 02	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan				
			5. 03	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP)				

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.05.2.409139/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4062-1545-1815-1194

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (409139) BALAI PEMASYARAKATAN PONTIANAK

Halaman : I A. 3

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan

- 6. 03 Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan
- 7. 04 Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
- 8. 04 Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
- 9. 05 Jumlah Layanan Perkantoran
- 10. 05 Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasarakatan (Bapas)
- 11. 06 Jumlah Kendaraan Bermotor
- 12. 06 Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan
- 13. 07 Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
- 14. 08 Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- 15. 09 Jumlah Gedung/Bangunan

Klasifikasi Rincian Output	1	:	6231.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	4.771.576.000
Rincian Output		:	01	EBA.956 Layanan BMN	1.00	Layanan	4.100.000
		:	02	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	Layanan	7.364.000
		:	03	EBA.962 Layanan Umum	1.00	Layanan	47.194.000
		:	04	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	4.712.918.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	6231.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,00	Unit, m2, Paket	86.553.000
Rincian Output		:	01	EBB.971 Layanan Prasarana Internal	1.00	Unit	86.553.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	6231.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	52,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	61.222.000
Rincian Output		:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	52.00	Orang	61.222.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.05.2.409139/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4062-1545-1815-1194

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (409139) BALAI PEMASYARAKATAN PONTIANAK

Halaman : I A. 4

Klasifikasi Rincian Output	4	:	6231.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	4,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	14.000.000
Rincian Output		:	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.00	Dokumen	3.500.000
		:	02	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.00	Dokumen	3.500.000
		:	03	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Dokumen	3.500.000
		:	04	EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja	1.00	Dokumen	3.500.000

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Pemasarakatan

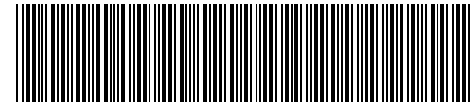
ttd.
Reynhard Silitonga
NIP. 67090332

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 013.05.2.409139/2024

I B. SUMBER DANA



DS:4062-1545-1815-1194

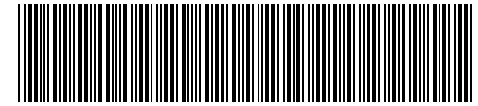
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
 Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
 Kode>Nama Satker : (409139) BALAI PEMASYARAKATAN PONTIANAK

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	5.583.189.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	5.583.189.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.05.2.409139/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



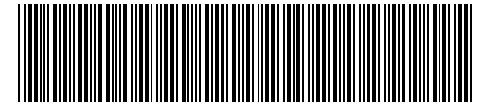
DS:4062-1545-1815-1194

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (409139) BALAI PEMASYARAKATAN PONTIANAK
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409139	BALAI PEMASYARAKATAN PONTIANAK	4.011.673	1.484.963	86.553	-	-	5.583.189		
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	649.838	-	-	-	649.838		
5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	-	649.838	-	-	-	649.838		
5252.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	649.838	-	-	-	649.838	13 . 51	
01	RM	-	649.838	-	-	-	649.838	042	
013.05.WA	Program Dukungan Manajemen	4.011.673	835.125	86.553	-	-	4.933.351		
6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	4.011.673	835.125	86.553	-	-	4.933.351		
6231.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	4.011.673	759.903	-	-	-	4.771.576	13 . 51	
01	RM	4.011.673	759.903	-	-	-	4.771.576	042	
6231.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	-	86.553	-	-	86.553	13 . 51	
01	RM	-	-	86.553	-	-	86.553	042	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.05.2.409139/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4062-1545-1815-1194

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (409139) BALAI PEMASYARAKATAN PONTIANAK
Kewenangan : (KD)

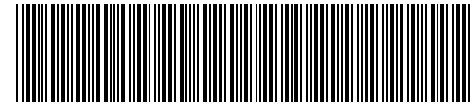
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6231.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	61.222	-	-	-	61.222	13 . 51	
01 RM		-	61.222	-	-	-	61.222	042	
6231.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	14.000	-	-	-	14.000	13 . 51	
01 RM		-	14.000	-	-	-	14.000	042	
JUMLAH		4.011.673	1.484.963	86.553	-	-	5.583.189		

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NIP. 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.05.2.409139/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4062-1545-1815-1194

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (409139) BALAI PEMASYARAKATAN PONTIANAK

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	409139	BALAI PEMASYARAKATAN PONTIANAK													
		RENCANA PENARIKAN DANA	379.867	611.970	704.182	478.846	348.563	602.562	401.738	331.475	356.807	406.815	328.289	632.075	5.583.189
		BELANJA PEGAWAI	249.870	262.272	524.946	271.553	265.473	497.404	271.215	278.871	278.871	275.043	280.785	555.370	4.011.673
		BELANJA BARANG	129.997	263.145	179.236	207.293	83.090	105.158	130.523	52.604	77.936	131.772	47.504	76.705	1.484.963
		BELANJA MODAL	0	86.553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.553
	013.05.BF.5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	49.050	94.686	27.450	104.469	56.736	27.450	104.169	26.250	24.750	105.418	21.150	8.260	649.838
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	49.050	94.686	27.450	104.469	56.736	27.450	104.169	26.250	24.750	105.418	21.150	8.260	649.838
	013.05.WA.6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	330.817	517.284	676.732	374.377	291.827	575.112	297.569	305.225	332.057	301.397	307.139	623.815	4.933.351
		51 BELANJA PEGAWAI	249.870	262.272	524.946	271.553	265.473	497.404	271.215	278.871	278.871	275.043	280.785	555.370	4.011.673
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	80.947	168.459	151.786	102.824	26.354	77.708	26.354	26.354	53.186	26.354	26.354	68.445	835.125
		53 BELANJA MODAL	0	86.553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.553
		PERKIRAAN PENERIMAAN	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	427	5.091
		- PNPB (425131)	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	427	5.091

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NIP. 67090332

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.05.2.409139/2024
IV A. B L O K I R**



DS:4062-1545-1815-1194

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT
Kode dan Nama Satker : [409139] BALAI PEMASYARAKATAN PONTIANAK

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NIP. 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.05.2.409139/2024
IV B. C A T A T A N**



DS:4062-1545-1815-1194

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT
Kode dan Nama Satker : [409139] BALAI PEMASYARAKATAN PONTIANAK

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NIP. 67090332